

## **Peranan Penilaian *Performance Good Public Governance* Melalui Sistem Pengendalian Manajemen di Rumah Sakit Umum daerah Di Surabaya Barat**

Aminatuzzuhro  
aminatuzzuhro@uwp.ac.id  
Mohammad Sodikin  
cakdikin@rocketmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang penilaian kinerja *Good Governance* di rumah sakit dengan melalui sistem pengendalian manajemen. Dengan adanya Otonomi Daerah dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kinerja pemerintahan yang baik. Penilaian kinerja (*Performance*) merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu kinerja (*Performance*) pemerintah daerah perlu dilakukan, untuk memperoleh informasi sejauh mana penggunaan anggaran atau pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sistem pengendalian manajemen dalam rangka menjalankan kegiatan untuk kepentingan masyarakat daerah

Populasi penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Surabaya Barat, peneliti mengambil sampel RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) sebagai perwakilan dari RSUD lainnya yang ada di Surabaya Barat. Sampel penelitian ini berjumlah 58 orang dengan metode Metode analisis data menggunakan regresi linier dengan menggunakan *SPSS 20 for Windows*. Hasil analisis uji regresi bahwa penilaian kinerja *Good Governance* di rumah sakit RSUD Bhakti Dharma Surabaya berpengaruh terhadap sistem pengendalian manajemen.

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan hasil yang positif dalam penilaian *performance Good Public Governance* yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Key Word : Penilaian *Performance Good Public Governance*, Sistem Pengendalian Manajemen**

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kebijakan kepada pemerintah daerah sesuai dengan pembagian menurut aturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan semua kebijakan untuk membangun daerah disebut dengan istilah “Otonomi Daerah”. Otonomi Daerah dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kinerja pemerintahan yang baik. Beberapa institusi nasional maupun internasional pada beberapa

tahun terakhir telah mencetuskan konsep *good governance* dengan tujuan mencapai kinerja (*Performance*) pemerintahan yang baik.

Penilaian kinerja (*Performance*) merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo,2007). Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan merupakan bagian dari kinerja keuangan yang menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah, dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran atau APBD untuk kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu kinerja (*Performance*) pemerintah daerah perlu dilakukan, untuk memperoleh informasi sejauh mana penggunaan anggaran atau pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan kegiatan untuk kepentingan masyarakat daerah.

Dalam pemerintahan daerah, Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) merupakan hal paling penting dalam melaksanakan otonomi daerah, meskipun banyak variabel penting lainnya yang berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seperti contoh variabel sumber daya manusia, organisasi, birokrasi, dan manajemen merupakan hal yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah dianggap hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Prinsip Good Governance menjadi perubahan mendasar dalam mewujudkan kinerja (*Performance*) pemerintah daerah yang baik, dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Menurut Baridwan (2004) bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik diperlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Berarti Pemerintah perlu merespon adanya suatu perubahan paradigma dalam mengambil suatu keputusan, agar perubahan tersebut dapat mengakibatkan kinerja (*Performance*) pemerintah daerah yang semakin baik.

Sistem Pengendalian Manajemen merupakan hal paling penting dalam melaksanakan otonomi daerah, meskipun banyak variabel penting lainnya yang berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seperti contoh variabel sumber daya manusia, organisasi, birokrasi, dan manajemen merupakan hal yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu, kinerja pemerintah daerah dianggap hal yang sangat vital dalam sistem pemerintahan daerah. Prinsip Good Governance menjadi perubahan mendasar dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, dengan adanya tuntutan

akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Hal ini ditegaskan oleh Baridwan (2004) bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik diperlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Berarti Pemerintah perlu merespon adanya suatu perubahan paradigma dalam mengambil suatu keputusan, agar perubahan tersebut dapat mengakibatkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

Dengan adanya sistem pengendalian yang jelas, kinerja pemerintah daerah dapat dipantau setiap saat, pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk memudahkan mengatasi problem yang terjadi pada suatu unit satuan kerja. Disamping sistem pengendalian diperlukan juga instrumen lain untuk menunjang kinerja pemerintah yang baik dalam unit satuan kerja, yaitu pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Keuangan Daerah pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang diperlukan, karena untuk menyajikan suatu laporan pertanggung jawaban dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau pengelolaan keuangan daerah. Menurut Newkirk (1986:24) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi keuangan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Dengan sistem pengendalian yang jelas, kinerja (*Performance*) pemerintah daerah dapat dipantau setiap saat, pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk memudahkan mengatasi problem yang terjadi pada rumah sakit. Disamping sistem pengendalian diperlukan juga instrumen lain untuk menilai kinerja (*Performance*) pemerintah yang baik yaitu pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah.

Menurut Anwar P Mangkunegara mendefinisikan penilaian kinerja sebagai berikut:

”Penilaian kinerja (*Performance*) adalah suatu proses penilaian kinerja yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya (Mangkunegara, 2004).”

Penilaian kinerja (*Performance*) yang dilakukan berdasarkan atas kriteria dan subkriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan kemudian hasil penilaian akan digunakan pihak manajemen untuk membuat keputusan. Aspek prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Analisis Kinerja dilakukan untuk

melakukan perbaikan dari kegiatan operasional sebuah instansi atau organisasi agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Menurut Nogi (2003) menjelaskan, “Tujuan Pokok analisis kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan”.

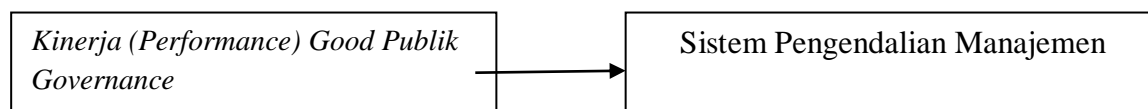
Kinerja Pemerintah adalah suatu hasil capaian yang diraih oleh suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Implementasi akuntansi berbasis akrual untuk sektor publik hanyalah paket awal dari reformasi sektor publik yang lebih luas seperti desentralisasi, pengenalan model kontrak terhadap penyediaan pelayanan pemerintah, maupun kerja sama sektor publik swasta (*public-private partnership*). Dibandingkan sistem berbasis kas sistem pelaporan akrual akan menjadi basis yang lebih memadai dalam mengukur kinerja pemerintah dalam jargon 3 E yaitu: *economy*, *effectiveness*, dan *efficiency* (Harun, 2009). Kinerja organisasi sektor publik tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh karena organisasi sektor publik bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik (Krisna, 2006). Dalam hal ini Pemerintah merupakan organisasi nir-laba yang kinerjanya bukan diukur melalui nominal yang diperoleh, melainkan pelayanan publik yang maksimal. *Good governance* adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya (The World Bank). *Good governance* bertumpu pada prinsip-prinsip universal; *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, and *Fairness* atau biasa dikenal dengan TARIF.

Mahmudi mengemukakan (2005) Hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Hukum menjadi suatu landasan kepatuhan para pegawai di pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan dan kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prinsip-prinsip *Good Public Governance* juga menjelaskan dalam KNKG (2005) bahwa kepastian hukum merupakan penyelenggaraan pemerintah yang harus didasarkan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan keadilan. Kinerja pemerintahan dapat menjadi baik, harus mendapat dukungan dengan adanya suatu tatanan hukum yang jelas sebagai bentuk kredibilitas suatu lembaga publik terhadap sektor swasta.

Hal ini juga dikatakan oleh Sedarmayanti (2009) bahwa supremasi hukum aparat birokrasi berarti ada kejelasan dan kredibilitas birokrasi terhadap sektor swasta, dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggung gugatan pemerintah.

### Kerangka Konseptual



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Metode penelitian digunakan berdasarkan kriteria yang berkaitan kinerja.

### Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penilaian Kinerja ( *Performance* )

Merupakan suatu pengukuran kinerja suatu unit satuan kerja yang dinilai sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Surabaya Barat

2. Sistem Pengendalian Manajemen

Suatu penilaian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola organisasi yang tercipta melalui fungsi-fungsi yang dilakukan oleh seorang atau kelompok. Fungsi-fungsi tersebut dapat dilihat sesuai dengan visi, misi, renstra organisasi, komitmen organisasi, dan job relevant information. Penilaian tersebut merupakan kunci dasar untuk mengetahui proses sistem pengendalian manajemen daerah tersebut.

3. *Good Public Governance*

Suatu prinsip pedoman dalam suatu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut dalam dilihat sesuai transparansi, peran anggaran, dan tata hukum pemerintahan.

## Populasi dan Sampel

### Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUD Bhakti Dharma Husada yang terletak di Jl. Kendung No.115-117 Sememi, kecamatan Benowo.Sememi Surabaya. Sesuai metode pengambilan sampel, pemilihan sampel menggunakan *non probability sampling* dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan kriteria :

1. Pegawai Tetap RSUD Bhakti Dharma Husada
2. Masa Kerja  $\leq 2$  tahun

Pada tahun 2016 jumlah pegawai tetap RSUD Bhakti Dharma Husada berjumlah 192 orang. Menurut pendapat dari Arikunto (2010:134-185) yangi maksud sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang di ambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Untuk penelitian ini menggunakan sampel sebesar 30 % dari populasi 192 orang yaitu 58 orang. Dalam pengambilan data peneliti ada kendala karena pada bulan Juni – Juli persiapan untuk melaksanakan akreditasi sehingga penulis menetapkan pengambilan data 30 %. Peenyebaran kuesioner kepada responden dengan melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa UWP Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu regresi linier.

### Metode Analisis

Data dalam penelitian dari hasil kuisisioner yang telah disebar kemudian diolah dan dianalisis dengan metode analisis statistik. Regresi berganda dengan menggunakan *SPSS 20 for Windows*.

Rumus : 
$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Y = Sistem Pengendalian Manajemen

X<sub>1</sub> = Penilaian Kinerja ( *Performance*) *Good Public Governance*

$\beta_1, \dots, \beta_2$  = koefisien regresi variabel (X)

a = konstanta

e = error

## ASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atas perubahan dari setiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,430	1,109		2,191	,033		
1 SistemPengendalianManajemen	,695	,070	,011	,148	,883	,544	1,840
GoodPublicGovernance	,845	,092	,909	12,419	,000	,544	1,840

Persamaan regresi linear yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = 2.430 + 0,010 X_1 + 1.145 X_2 + 1.109$$

Uji F digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel – variabel independen dengan variabel dependen secara simultan (bersama-sama). Berikut adalah tabel hasil uji F dengan perhitungan statistik menggunakan SPSS versi 20 :

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	824,593	2	412,296	144,172	,000 <sup>b</sup>
Residual	157,287	55	2,860		
Total	981,879	57			

a. Dependent Variable: Performance

b. Predictors: (Constant), GoodPublicGovernance, SistemPengendalianManajemen

Sumber : Lampiran data diolah SPSS versi 20, 2016

Berdasarkan tabel anova dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas *system pengendalian Manajemen dan Good Publik Governance* berpengaruh secara simultan (bersama - sama) pada Performance . Hal itu terlihat dari tingkat signifikansi F yang sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Uji T untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas *system pengendalian Manajemen dan Good Publik Governance* secara parsial atau individual menerangkan variabel terikat Performance

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,430	1,109		2,191	,033		
1 Sistem Pengendalian Manajemen	,695	,070	,011	,148	,883	,544	1,840
Good Public Governance	,845	,092	,909	12,419	,000	,544	1,840

Sumber : Lampiran , data diolah SPSS versi 20, 2016

Pada tabel 4.8 dapat dinyatakan bahwa :

1. Pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel *system pengendalian Manajemen* memberikan kontribusi dalam meningkatkan Performance dalam pengujian hipotesis secara simultan untuk variabel *system pengendalian Manajemen* mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  berarti *system pengendalian Manajemen* berpengaruh signifikan secara parsial pada Performance
2. Pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel *Good Publik Governance* memberikan kontribusi dalam meningkatkan performance dalam pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel *Good Publik Governance* mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  berarti *Good Publik Governance* berpengaruh signifikan secara parsial pada performance



## KESIMPULAN

Berdasarkan pada tujuan, hasil analisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Performance Kinerja RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Manajemen hal ini terlihat dari hasil analisis mempunyai nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sistem pengendalian manajemen di RSUD Bhakti Dharma Husada yang meliputi visi misi, renstra, komitmen dan job relevan informasi telah dilaksanakan dengan baik.
2. *Performance kinerja* RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya sesuai prinsip-prinsip *Good Public Governamce* yaitu transparansi, peran anggaran, dan tata hukum pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa informasi tentang visi misi, renstra, laporan keuangan dan informasi yang di butuhkan masyarakat sudah secara transparansi telah di publikasikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N. And Young, D. W. (1999) *Management Control in Nonprofit Organizations*, 6th Ed., Illinois: Irwin.
- Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1, Mei 2006: 1-17.
- Rachmawati. S. R. 2009. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pada Pemda Kabupaten

Sukoharjo.” *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Rantelangi, Cornelius. 2014. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Independensi Auditor, Pengendalian Internal dan Kepemimpinan Etikal Terhadap Penerapan Good Governance dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Propinsi Kalimantan Timur”. Disertasi. Program Doktor ILMU EKONOMI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Surabaya.

Supriyono. 2004 *Akuntansi Manajemen 2 : ”Struktur Pengendalian Manajemen”*.Edisi I. Yogyakarta : BPFE UGM

Sugiyono. 2007. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta.

*United States General Accounting Office, Standards for Internal Control in the Federal Government*, November, 1999